

Pembentukan Civic Moral Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara pada Pembelajaran PPKn di PTKIN

Irma Irayanti

Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia
irmairayanti@iainkendari.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
Diterima: 18 – 01 - 2024 Disetujui: 31 – 05 - 2024 Kata kunci: civic morals, Pancasila, ideologi, identitas, pembelajaran, PPKN, PTKIN	Artikel ini membahas peran penting civic morals dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab di Perguruan Tinggi Indonesia, khususnya di IAIN Kendari sebagai representatif dari PTKIN. Civic morals memainkan peran kunci dalam mencegah radikalisme dan memperkuat nilai-nilai ke-Indonesiaan, terutama dengan merujuk pada Pancasila. Tujuan penelitian ini adalah bahaimana pembentukan civic morals dapat memperkuat ideologi dan identitas warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mempersiapkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan ideologi dan identitas warga negara yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain kajian literatur digunakan untuk mengidentifikasi kata kunci, mengumpulkan, mengorganisir, dan mereview literatur, serta mengembangkan peta literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic morals berperan krusial dalam membentuk karakter mahasiswa, yang dihadapkan pada tantangan moral di lingkungan Perguruan Tinggi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dianggap esensial, dengan artikel ini memfokuskan pada konteks ke-Indonesiaan dan pembentukan karakter mahasiswa. Sebagai kesimpulan, artikel menyajikan sebuah kerangka model pembelajaran pembentukan civic morals Pancasila, melibatkan perencanaan kurikulum, pengembangan materi, model pembelajaran, evaluasi, integrasi teknologi, dan pengembangan keterampilan guru. Model ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila, mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan ideologi dan identitas warga negara yang kuat.
Keywords: <i>Civic morals Pancasila citizen ideology and identity civic education (PPKN) learning Islamic Higher Education Institution (PTKIN)</i>	ABSTRACT <i>Formation of Civic Morals of Pancasila for Strengthening Ideology and Citizen Identity in Civics Education at PTKIN.</i> This article explores the crucial role of civic morals in shaping the character of responsible citizens in Indonesian Higher Education, specifically at IAIN Kendari as a representative of PTKIN. Civic morals play a key role in preventing radicalism and reinforcing Indonesian values, particularly by referring to Pancasila. The research aims to understand how the formation of civic morals can strengthen the ideology and identity of citizens based on Pancasila values in daily life, preparing students to actively participate in building a society grounded in a strong national ideology and identity. The qualitative research employs a literature review design, involving the identification of keywords, literature collection, organization, review, and development of a literature map. The findings indicate the crucial role of civic morals in shaping students' character amid moral challenges in the university environment. The implementation of Pancasila values is considered essential, with the article focusing on the Indonesian context and student character formation. In conclusion, the article presents a framework for the teaching and learning of Pancasila-based civic morals, encompassing curriculum planning, material development, instructional models, evaluation, technology integration, and teacher skill development. This model is expected to enhance students' understanding of Pancasila values, preparing them to actively contribute to constructing a society grounded in a robust national ideology and citizen identity.

Copyright © 2024 (Irma Irayanti). All Right Reserved

Pendahuluan

Civic morals memiliki peran krusial dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban, serta berkontribusi positif dalam masyarakat (Durkheim et al., 2018). Perguruan Tinggi memerlukan penguatan nilai *civic moral* ke-Indonesiaan untuk mencegah radikalisme. Pembentukan *civic morals* di Perguruan Tinggi merupakan bagian dari upaya meneropong pemahaman moral mahasiswa terkait dengan identitas dan ideologi mereka. Melalui pembentukan norma-norma moral yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan partisipasi aktif, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan mahasiswa yang berintegritas, memahami nilai-nilai sosial, dan siap berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Masalah *civic moral* ini tidak saja pada tatanan gaya hidup namun juga pada tatanan keputusan politik mahasiswa. Keputusan politik ini menjadi dasar gerakan politik praktis mahasiswa dalam mempengaruhi keputusan politik dan bagaimana menjadi teladan bagi mereka tentang bagaimana *civic moral* mempengaruhi integritas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep moral selalu dikaitkan dengan "*baik dan buruk*" (Kohlberg, 1971), sementara ukuran moral dalam konsep ke-Indonesiaan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila diharapkan menjadi nilai moral kewarganegaraan yang menjadi jembatan moral kearifan lokal karena *civic moral* menjadi sumber bagi pembentukan *civic culture* (Feriandi, 2017).

Civic morals menjadi penting dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab sebagai warga negara dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain beberapa kasus sebelumnya, mahasiswa juga dapat tergoda untuk melakukan kecurangan dalam berbagai aspek kehidupan seperti akademik, sosial, maupun budaya karena merasa bahwa hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Ainurrahman (2023) mengungkap hasil survey Setara Institute bahwa mayoritas anak muda yang masih duduk sebagai mahasiswa SMA menganggap bahwa Pancasila dapat diganti tanpa memahami bahwa Pancasila merupakan Ideologi Negara yang seharusnya menjadi dasar moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya apabila masuk ke lingkungan Lembaga Pendidikan tinggi yang radikal dan menjadi fasilitator pemikiran bahwa Pancasila dapat di ganti sebagai ideologi negara. Peran

kampus dalam membentuk *civic moral* yang Pancasilais sangat penting.

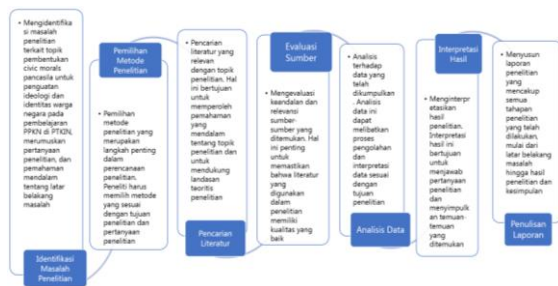
Namun, meskipun pembentukan *civic morals* melalui implementasi nilai-nilai Pancasila di anggap penting, penelitian yang mendalam mengenai topik ini masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembentukan civic morals pancasila untuk penguatan ideologi dan identitas warga negara pada pembelajaran PPKn di IAIN Kendari sebagai refresentatif dari PTKIN.

Artikel ini diharapkan dapat memperkuat ideologi dan identitas warga negara melalui pembentukan civic morals yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga berkontribusi terhadap pembentukan civic morals berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dapat membantu mahasiswa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang berlandaskan ideologi dan identitas warga negara yang kuat.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain kajian literatur yang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, peneliti perlu mengidentifikasi kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, yakni pembentukan civic morals pancasila untuk penguatan ideologi dan identitas warga negara pada pembelajaran PPKn di PTKIN. Setelah itu, peneliti mengumpulkan artikel jurnal, buku, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik. Kemudian, mengorganisir dan mereview literatur sebagai dasar rasional dari masalah penelitian terkait pembentukan civic morals pancasila untuk penguatan ideologi dan identitas warga negara pada pembelajaran PPKn di PTKIN dalam sebuah desain kajian literatur untuk penelitian kualitatif (Creswell & Creswell, 2017). Peneliti juga perlu mempertimbangkan struktur keseluruhan untuk mengorganisir studi-studi tersebut, serta mengembangkan peta literatur yang menunjukkan kategori-kategori utama studi dan memposisikan studi yang diusulkan dalam kategori-kategori tersebut lalu menulis ringkasan dari studi-studi yang relevan, mencatat referensi lengkap sesuai dengan pedoman gaya tertentu dan mengekstrak informasi tentang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta hasil akhir dari studi-studi tersebut (Creswell &

Creswell, 2017). Penelitian ini mengorganisir review literatur sebagai dasar rasional dari masalah penelitian terkait bagaimana pembentukan civic morals pancasila untuk penguatan ideologi dan identitas warga negara pada pembelajaran PPKN di PTKIN melalui desain kajian literatur untuk penelitian kualitatif (Boote & Beile, 2005). Peneliti juga perlu mempertimbangkan struktur keseluruhan untuk mengorganisir studi-studi tersebut, serta mengembangkan peta literatur yang digunakan untuk menunjukkan kategori-kategori utama studi dan memposisikan studi yang diusulkan dalam kategori-kategori tersebut.



Gambar. 1 Desain Penelitian

Hasil dan pembahasan

Pembentukan *civic moral* atau moral kewarganegaraan tidaklah terlepas dari ideologi dan identitas nasional berbangsa dan bernegara (Durkheim et al., 2018, Terms, 2006), dan ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Reilly & Stapleford, (2018) mengungkapkan bahwa pembentukan nilai moral melibatkan berbagai faktor, termasuk budaya, lingkungan, dan praktik-praktik dalam komunitas. Nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat juga berpengaruh dalam proses ini. Pembentukan nilai moral juga terjadi melalui praktik kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Pendidikan moral juga berperan penting dalam membantu individu memahami nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat dan mengembangkan sikap serta perilaku yang sesuai. Pembentukan moral para mahasiswa dapat melalui pengembangan kecerdasan intelektual dan pemahaman konsep-konsep kebajikan tradisional dalam dialog dengan praktik dan idiom modern dalam dunia ilmu pengetahuan yang terus berkembang.

Fite & Laird, (1927) dalam artikelnya mengungkapkan pentingnya pendidikan moral dalam pembentukan nilai kebajikan. Pendidikan moral membantu individu memahami nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat dan membantu mereka mengembangkan sikap dan

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ke-Indonesia-an, nilai yang diyakini sebagai kristalisasi dari nilai luhur bangsa tertuang dalam nilai-nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter moral warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima nilai tersebut juga harusnya menjadi nilai kebajikan sebagai pedoman berperilaku yang dapat mendorong kemajuan kesejahteraan manusia sebagaimana nilai kebajikan Aristotelian yang membantu individu mencapai kehidupan yang baik dan berkontribusi pada masyarakat (Aristotle & Crisp, 2000; Reilly & Stapleford, 2018).

Civic moral menurut (Durkheim et al., 2018) adalah aturan moral dan hukum yang berlaku dalam hubungan individu dengan kelompok politik, seperti negara. Hal ini berkaitan erat dengan identifikasi masyarakat dengan wilayahnya dan pengakuan terhadap otoritas politik yang menguasai wilayah tersebut. Civic moral membentuk tugas dan kewajiban warga negara terhadap negara, serta sebaliknya, mencakup hubungan yang timbal balik antara individu dan kelompok politik. Kelompok politik ini memiliki ciri penting berupa identifikasi dengan wilayahnya, dan dalam konteks kelompok politik, individu memiliki tugas dan kewajiban terhadap negara yang mewakilinya, dan sebaliknya, negara memiliki tanggung jawab terhadap warganya.

Terms (2006) mengungkapkan bahwa *civic morals* berhubungan dengan ideologi negara, hal ini dimaknai bahwa *civic morals* bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan pernyataan Splitter (2011) yang menyatakan bahwa kepribadian dan identitas kewarganegaraan seseorang memberikan landasan yang memadai untuk moralitas secara umum, dan pendidikan moral secara khusus dimana ada hubungan antara moralitas dan kewarganegaraan walaupun hal tersebut merupakan turunan dari akar filosofis *citizenship* dan moral. Splitter (2011) juga menjelaskan adanya implikasi konsepsi relasional dari kepribadian dalam konteks sekolah dan ruang kelas. Dia berargumen bahwa konsepsi ini tepat direpresentasikan ketika ruang kelas berfungsi sebagai komunitas penelitian, di mana setiap anggota didorong untuk melihat dirinya sebagai satu di antara yang lain yang sangat bergantung pada sosial budaya masyarakat.

Pentingnya pembentukan *civic morals* melalui penerapan nilai-nilai pada pembelajaran di IAIN

Kendari adalah salah satu upaya merubah tata nilai pada mahasiswa di era digital yang sangat cepat dalam mentransfer informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan di era digital tidak terbatas ruang dan waktu dalam memproduksi *logical fallacy* dengan konten *boaks* yang bebas di akses. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak media sosial dan internet sangat besar terhadap perilaku *civic moral* mahasiswa begitu pula mahasiswa di Lembaga Islam. Beberapa masalah moral yang dihadapi mahasiswa, antara lain penyebaran berita bohong, *boaks*, ujaran kebencian, *cyberbullying*, pornografi, dan kekerasan yang dapat merusak nilai-nilai moral dan kebangsaan sampai kepada masalah radikalisme. Fenomena radikalisme salah seorang aktivis mahasiswa di IAIN Kendari yang pernah terpapar di masa lalu, masih mendatangkan kekhawatiran adanya *silent action* yang berganti wajah namun berbahaya bagi *civic moral* mahasiswa Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Selain itu menjamurnya budaya yang tidak hanya berkiblat pada barat, Korean style dan kearab-araban, bahkan memiliki kebanggaan dengan mempraktikkan budaya tersebut merupakan hal yang resisten bagi ideologi dan karakter mahasiswa.

Terdapat dua pandangan yang berkonflik terkait tujuan negara dan peranannya dalam *civic moral* menurut Durkheim et al., (2018). Pandangan pertama adalah pandangan individualistik yang menekankan bahwa tujuan masyarakat adalah individu dan peran negara seharusnya terbatas pada melindungi hak-hak individu, menjaga keadilan, dan memberlakukan aturan hukum. Di sisi lain, pandangan kedua adalah pandangan mistik yang berpendapat bahwa masyarakat memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada tujuan individu, dan negara harus mengejar tujuan sosial ini dengan mengajak individu untuk berkontribusi dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Pandangan mistik menekankan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan kehormatan bagi individu karena berpartisipasi dalam mencapai tujuan kolektif. Perspektif yang berbeda ini menggambarkan peran negara dalam kehidupan bermasyarakat. Solusi individualistik lebih fokus pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan individu untuk bertindak, sementara solusi mistik menekankan pentingnya mengabdikan pada masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Dalam implementasinya, suatu negara dapat mencerminkan salah satu dari pandangan ini atau mencari keseimbangan antara keduanya. Civic moral menjadi landasan bagi masyarakat dalam

memahami peran negara dan hubungan antara individu dan kelompok politik, sehingga mempengaruhi cara berinteraksi dan berkontribusi dalam kehidupan bersama. Durkheim et al., (2018) juga menganggap penting pengembangan moral individualisme dalam masyarakat dan peran negara untuk memastikan hak-hak individu. Negara harus memperluas fungsinya untuk melindungi hak-hak individu dan tidak hanya berfungsi sebagai arbiter atau administrator keadilan. Hak-hak individu berkembang secara terus-menerus dan tidak ada batas pasti untuk kemajuannya. Peran negara dalam membebaskan individu dari dominasi kolektif dan menyediakan lingkungan di mana individu dapat berkembang secara bebas dan demokratis. Civic moral berperan penting dalam konteks struktur pemerintahan.

Pembentukan Civic Morals Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara dapat dikaitkan dengan filsafat pendidikan Paideia yang diusulkan oleh Mortimer J. Adler (1998). Paideia menekankan pentingnya pendidikan yang mencakup akuisisi pengetahuan, pengembangan keterampilan intelektual, dan pemahaman yang diperluas tentang ide dan nilai-nilai (M.J. Adler & Isaacs, 1983). Model ini juga mendukung pendekatan pembelajaran Inquiry yang mendorong mahasiswa untuk aktif mencari pengetahuan, memahami proses belajar, dan menerapkan keterampilan berpikir kritis (Kilbane & Milman, 2014). Dalam konteks teori belajar, model ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kolaborasi, yang merupakan bagian dari keterampilan belajar dan inovasi abad ke-21 (Kilbane & Milman, 2014). Selain itu, model ini juga mendukung teori konstruktivisme yang menekankan bahwa mahasiswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi.

Model pembelajaran pembentukan civic moral juga didukung oleh teori Socratic Seminar (Kilbane & Milman, 2014) yang menekankan pada pengembangan pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif melalui dialog dan diskusi terstruktur. Selain itu, model ini juga mendukung pendekatan pembelajaran berbasis nilai yang mendorong mahasiswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hasil penelitian yang di ungkap oleh Kilbane & Milman (2014) telah menunjukkan bahwa model Socratic Seminar dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif. Selain itu, pendekatan

pembelajaran berbasis nilai telah terbukti efektif dalam membentuk civic morals dan memperkuat identitas warga negara. Penelitian lainnya terkait pembentukan nilai moral melalui keteladanan nilai kebajikan melalui habituasi juga menjadi kajian menarik dalam konsep keteladanan Aristotelian (Kristjánsson, 2015). Namun tidak ada kajian terkait dengan apa saja indikator yang dapat membentuk moral warga negara atau *civic moral*. Splitter (2011) hanya menekankan perlunya mempertimbangkan konsep pribadi (*personhood*) dalam mengatasi masalah yang lebih mendalam tentang identitas dan moralitas individu, terutama dalam konteks pendidikan moral dan nilai. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan model pembelajaran terkait pembentukan *civic moral* Emile Durkheim dari perspektif nilai-nilai Pancasila dalam konsep kewarganegaraan sebagai *angle of view*.

Pembentukan *Civic Morals* Pancasila untuk penguatan ideologi dan identitas warga melibatkan beberapa langkah yang coba ditawarkan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kurikulum
Identifikasi tujuan pembelajaran jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai dalam satu semester. Rencanakan kurikulum yang mencakup pengenalan nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan refleksi terstruktur tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Perencanaan ini dilakukan pada kurikulum PTKIN yang memungkinkan mahasiswa aktif dalam pembelajaran.
2. Pengembangan Materi Pembelajaran
Buat materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai Pancasila, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan studi kasus yang relevan dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Pengembangan materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar di PTKIN.
3. Penggunaan Model Pembelajaran
Pilih model-model pembelajaran yang sesuai untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila, seperti Socratic Seminar, Cooperative Learning, atau Problem-Based Learning. Sesuaikan model-model ini dengan konteks pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan model pembelajaran yang tepat adalah salah satu kunci keberhasilan pembelajaran di PTKIN.
4. Pengembangan Evaluasi

Buat alat evaluasi yang mencakup penilaian terhadap pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata, dan pengembangan kesadaran akan identitas sebagai warga negara Indonesia. Evaluasi di PTKIN terkait pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menyaji catatan perbaikan pada pelaksanaan ke depan.

5. Penggunaan Teknologi
Integrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung penyajian materi, evaluasi, dan kolaborasi antara siswa. Penggunaan atau integrasi teknologi dalam pembelajaran saat ini menjadi tren dan praktik baik yang perlu juga dikembangkan di PTKIN.
6. Pengembangan Keterampilan Guru
Berikan pelatihan kepada guru mengenai model pembelajaran yang akan digunakan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Pengembangan keterampilan guru menjadi salah satu kunci meningkatkan mutu SDM di PTKIN.
7. Pengembangan Sistem Pendukung
Pastikan tersedianya sistem pendukung, seperti bahan bacaan, sumber daya teknologi, dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung model pembelajaran. Beberapa teknologi yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan sistem pendukung ini termasuk:
 1. Alat Pencarian Online
Penggunaan mesin pencari untuk menemukan sumber daya yang kaya untuk eksplorasi dan analisis .
 2. Alat Grafik Organisasi
Penggunaan alat grafik untuk mendukung analisis .
 3. Materi Multimedia
Penggunaan materi multimedia yang menyajikan konten untuk eksplorasi dan analisis.
 4. Alat Komunikasi
Penggunaan alat komunikasi, seperti microblogging, untuk memfasilitasi pertanyaan selama dialog .
 5. Rekaman Audio/Video
Penggunaan rekaman audio/video dari dialog untuk analisis lebih lanjut .
 6. Alat Evaluasi Online
Penggunaan alat evaluasi online atau sistem respons audiens untuk memfasilitasi evaluasi .

Integrasi teknologi ini bertujuan untuk memperkuat penyajian materi, mendukung proses evaluasi, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan penguatan ideologi serta identitas warga negara. Dengan adanya sistem pendukung yang terintegrasi dengan teknologi, diharapkan model pembelajaran ini dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan menarik bagi siswa, serta mendukung pengembangan keterampilan 21st century learners (Kilbane & Milman, 2014). Beberapa langkah penting dalam pengembangan model ini adalah *Pertama*, dosen memperkenalkan nilai-nilai Pancasila dan sejarah pembentukannya kepada mahasiswa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang ideologi negara dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, mahasiswa diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini mendorong mahasiswa untuk memikirkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata.

Ketiga, mahasiswa diberi tugas untuk merumuskan tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Tugas ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk memikirkan cara-cara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan hasil pembentukan civic morals mereka dan melakukan diskusi terstruktur tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini memungkinkan mahasiswa untuk berbagi ide, pemikiran, dan refleksi mereka tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui langkah-langkah ini, model pembelajaran ini mendorong mahasiswa untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat ideologi dan identitas warga negara.

Kerangka model pembelajaran Pembentukan Civic Morals Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara menggunakan pendekatan yang terstruktur dengan mempertimbangkan Sintaks Model, Prinsip Reaksi Pengelolaan, Dampak Instruksional, Sistem Pendukung, dan Sistem Sosial.



Gambar 2 Tawaran Kerangka model pembelajaran Pembentukan Civic Morals Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara pada pembelajaran PPKn di PTKIN

1. Sintaks Model Pembelajaran (Kilbane & Milman, 2014)
 - 1.1 Identifikasi Tujuan Pembelajaran
Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas terkait dengan pembentukan civic morals Pancasila.
 - 1.2 Pengembangan Materi Pembelajaran
Membuat materi pembelajaran yang kaya akan nilai-nilai Pancasila dan penguatan ideologi serta identitas warga negara.
 - 1.3 Pemilihan Model Pembelajaran
Memilih model pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila.
 - 1.4 Pengembangan Evaluasi
Membuat alat evaluasi yang relevan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan nilai-nilai Pancasila.
 - 1.5 Integrasi Teknologi
Mengintegrasikan teknologi dalam penyajian materi, evaluasi, dan kolaborasi antara siswa.
 - 1.6 Pengembangan Keterampilan Guru
Melatih guru dalam mengembangkan keterampilan untuk mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila.
 - 1.7 Pengembangan Sistem Pendukung
Membangun sistem pendukung yang terintegrasi dengan teknologi untuk memperkuat pembelajaran.
2. Prinsip Reaksi Pengelolaan
 - 2.1 Fasilitasi Pembelajaran
Membantu siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan pembelajaran.
 - 2.2 Evaluasi Proses dan Hasil

- Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk memastikan pemahaman yang mendalam.
- 2.3 Penyesuaian Pembelajaran
Menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memastikan pemahaman yang optimal.
 - 2.4 Pemberian Umpan Balik
Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka
 3. Dampak Instruksional
 - 3.1 Penguatan Ideologi dan Identitas
 - 3.2 Pembelajaran ini akan membantu siswa memperkuat pemahaman mereka terhadap ideologi Pancasila dan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia (Executive & November, 2008).
 - 3.3 Pengembangan Keterampilan Berpikir
Pembelajaran ini juga akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila.
 - 3.4 Peningkatan Kolaborasi dan Komunikasi
Pembelajaran ini akan meningkatkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dalam konteks nilai-nilai Pancasila (Kilbane & Milman, 2014).
 4. Sistem Pendukung
 - 4.1 Integrasi Teknologi
Sistem pendukung ini akan mengintegrasikan teknologi dalam penyajian materi, evaluasi, dan kolaborasi antara siswa .
 - 4.2 Akses Sumber Daya
Sistem ini akan memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya yang mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila .
 - 4.3 Pelatihan Guru
Sistem ini akan memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan dalam mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila .
 - 4.4 Pendukung Bahan Bacaan
Sistem ini akan menyediakan bahan bacaan yang relevan dan mendukung untuk mendalami pemahaman nilai-nilai Pancasila .
 5. Sistem Sosial
 - 5.1 Kolaborasi antara Siswa
 - 5.2 Sistem sosial ini akan mendorong kolaborasi antara siswa dalam

memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Kilbane & Milman, 2014).

- 5.3 Dukungan dari Sekolah dan Keluarga
Sistem ini akan melibatkan dukungan aktif dari sekolah dan keluarga dalam memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila .
- 5.4 Integrasi dengan Konteks Sosial
Sistem ini akan mengintegrasikan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dengan konteks sosial dan budaya lokal untuk memperkuat pemahaman siswa

Model pembelajaran Pembentukan Civic Morals Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara melibatkan pengenalan nilai-nilai Pancasila, diskusi tentang penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tugas untuk merumuskan tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, presentasi hasil pembentukan civic morals, dan diskusi terstruktur tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Dosen memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, dan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan civic morals. Dosen juga membantu mahasiswa dalam merefleksikan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Model ini bertujuan untuk memperkuat ideologi dan identitas warga negara melalui pembentukan civic morals yang berlandaskan Pancasila. Dampak instruksionalnya termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata, dan pengembangan kesadaran akan identitas sebagai warga negara Indonesia. Model ini didukung oleh pendekatan pembelajaran berbasis nilai, teori konstruktivisme, dan teori Socratic Seminar. Selain itu, model ini juga memanfaatkan teknologi dalam evaluasi dan penyajian materi pembelajaran. Dalam konteks sistem sosial, model ini mendorong kolaborasi antara mahasiswa dalam diskusi, presentasi, dan evaluasi. Model ini juga mempromosikan pemahaman tentang nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan yang kuat dalam masyarakat.

Model ini menurut Kilbane & Milman (2014) memiliki keunggulan diantaranya adalah memperkuat ideologi dan identitas warga negara karena membantu mahasiswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperkuat ideologi dan identitas warga negara. Selain itu juga dapat mendorong berpikir kritis melalui diskusi

terstruktur dan presentasi, model ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan tantangan dalam mewujudkannya. Model ini mempromosikan kolaborasi antara mahasiswa dalam diskusi, presentasi, dan evaluasi, serta mengajarkan manfaat kerja sama dan komunikasi yang produktif. Namun diantara kelebihan terdapat juga kekurangan dan kelemahannya yakni keberhasilannya tergantung pada dosen sebagai fasilitator dalam memandu diskusi, memberikan umpan balik, dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa (Kilbane & Milman, 2014). Selain itu, Model ini mungkin tidak cukup fleksibel untuk diterapkan dalam konteks pendidikan yang berbeda, terutama di luar lingkungan kelas yang terstruktur. Penerapan model ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat ideologi dan identitas warga negara melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta memberi dampak positif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan berkomunikasi secara produktif.

Simpulan

Pembentukan civic morals merupakan hal penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban, serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Pancasila dianggap sebagai landasan moral dan ideologi bangsa Indonesia yang dapat menjadi pijakan dalam membentuk kewarganegaraan yang berorientasi pada partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial. Dalam membentuk karakter civic moral Pancasila diusulkan Model pembelajaran yaitu Pembentukan Civic Morals Pancasila untuk Penguatan Ideologi dan Identitas Warga Negara yang melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, penggunaan model pembelajaran, pengembangan evaluasi, penggunaan teknologi, pengembangan keterampilan guru, dan pengembangan sistem pendukung. Model ini diharapkan dapat memperkuat ideologi dan identitas warga negara melalui pembentukan civic morals yang berlandaskan Pancasila. Keunggulan model ini adalah memperkuat ideologi dan identitas warga negara, mendorong berpikir kritis, dan mempromosikan kolaborasi dan komunikasi. Penerapan model ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat ideologi dan identitas warga negara melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila.

Referensi

- Adler, M.J., & Isaacs, J. E. (1983). The Paideia Proposal: An Educational Manifesto. *Contemporary Education*, 54(4), 314.
- Adler, Mortimer J. (1998). *Paideia proposal*. Simon and Schuster.
- Ainurrahman. (2023). *Survei Setara Institute: Mayoritas Pelajar SMA Anggap Pancasila Bisa Diganti*.
<https://www.konteks.co.id/nasional/119310/survei-setara-institute-mayoritas-pelajar-sma-anggap-pancasila-bisa-diganti/>
- Aristotle, & Crisp, R. (2000). Aristotle: Nicomachean Ethics: Nicomachean Ethics. *Indianapolis: Hackett*.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3–15.
<https://doi.org/10.3102/0013189X034006003>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Durkheim, É., Brookfield, C., & Turner, B. S. (2018). Professional ethics and civic morals. In *Professional Ethics and Civic Morals*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780429452901>
- Executive, N., & November, C. (2008). NCTE Framework for 21st Century Curriculum and Assessment Adopted by the NCTE Executive Committee. In *Assessment* (pp. 19–22). National Council of Teachers of English, NCTE Executive Committee.
- Ferandi, Y. A. (2017). Revitalisasi moral kewarganegaraan dalam ungkapan Jawa sebagai sumber pembentukan civic culture dan politic culture. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 176–182.
<https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15323>
- Fite, W., & Laird, J. (1927). A Study in Moral Theory. *The Philosophical Review*, 36(2), 183.
<https://doi.org/10.2307/2178900>
- Kilbane, clare R., & Milman, N. B. (2014). *Teaching Models Desaining Instruction for 21st Century Learners*. Pearson Higher Ed.
- Kohlberg, L. (1971). Stages of moral development. *Moral Education*, 1(51), 23–92.
- Kristjánsson, K. (2015). Aristotelian character education. In *Aristotelian Character Education*. Routledge.

- <https://doi.org/10.4324/9781315752747>
Reilly, T. S., & Stapleford, T. A. (2018). Science, virtue, and moral formation. *Journal of Moral Education*, 47(3), 267–271. <https://doi.org/10.1080/03057240.2018.1484583>
- Splitter, L. (2011). Identity, citizenship and moral education. *Educational Philosophy and Theory*, 43(5), 484–505. <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2009.00626.x>
- Terms, F. (2006). Action plan for the development of civic morality. *Chinese Education and Society*, 39(2), 56–68. <https://doi.org/10.2753/CED1061-1932390206>